

GOVERNANSI DIGITAL SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Sri Yulianty Mozin^{1*}, Nia Rahmadani Bangko², Susanti Abdullah³, Nadia Sawali⁴,
Fidyan Daud⁵, Ni Ketut Juliawati⁶

¹ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
yulmozin@ung.ac.id

² Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
niabangkohulalango@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
abdullahsusanti70@gmail.com

⁴ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
nadidasawali22@gmail.com

⁵ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
fidyandaud005@gmail.com

⁶ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
niketutjuliawati5@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong munculnya konsep governansi digital sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat akibat keterbatasan akses informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran governansi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah dalam 7 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi governansi digital melalui platform e- government, media sosial, dan aplikasi pelayanan publik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital, literasi teknologi, dan infrastruktur masih menjadi hambatan. Kesimpulannya, governansi digital memiliki potensi besar sebagai strategi peningkatan partisipasi masyarakat, namun memerlukan dukungan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Governansi Digital, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Publik, E-Government, Teknologi Informasi

ABSTRACT

Digital transformation in the public sector has led to the emergence of digital governance as a strategic approach to enhance public participation in public policy processes. The main issue addressed in this study is the low level of public participation due to limited access to information and communication between government and citizens. This study aims to analyze the role of digital governance in increasing public participation through the use of information and communication technology. The method used is a literature study by reviewing scientific journals from the last seven years. The results show that the implementation of digital governance through e-government platforms, social media, and public service applications can increase transparency, accountability, and citizen engagement in policymaking. However, challenges such as digital divide, technological literacy, and infrastructure remain obstacles. In conclusion, digital governance has great potential as a strategy to enhance public participation, but requires inclusive and sustainable policy support.

Keyword: Digital Governance, Public Participation, Public Policy, E-Government

Submisi: 20-04-2026

Diterima: 21-04-2026

Dipublikasikan: 05-05-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Transformasi ini mendorong munculnya konsep governansi digital sebagai bentuk adaptasi pemerintah dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks dan dinamis. Governansi digital tidak hanya sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Mergel et. al., (2019), transformasi digital dalam sektor publik mampu meningkatkan efisiensi layanan serta mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas kebijakan publik di era modern.

Konteks kebijakan publik, partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Partisipasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Menurut Nabatchi & Leighninger (2020), partisipasi publik yang efektif dapat meningkatkan legitimasi pemerintah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi bagian inti dalam proses demokrasi modern yang berbasis kolaborasi.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi digital, serta kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Meijer & Bolívar (2018) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam partisipasi publik adalah kurangnya keterbukaan data pemerintah yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu, minimnya ruang partisipasi yang disediakan secara formal juga menjadi kendala yang menghambat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kebijakan publik.

Kondisi tersebut menuntut adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang mampu menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Governansi digital hadir sebagai solusi yang menawarkan pendekatan baru dalam meningkatkan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi. Melalui platform digital, pemerintah dapat menyediakan akses informasi yang lebih luas, transparan, dan real-time kepada masyarakat.

Menurut Criado et. al., (2020), digitalisasi pemerintahan memungkinkan terciptanya ekosistem kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam proses kebijakan publik secara lebih terbuka dan interaktif.

Governansi digital memanfaatkan berbagai instrumen seperti e-government, media sosial, serta aplikasi layanan publik untuk menciptakan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai media

penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan aspirasi.

Nam (2019) menyatakan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan engagement masyarakat serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi partisipatif di era digital.

Perkembangan teknologi juga mendorong munculnya konsep smart governance yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Smart governance menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Bolivar (2021), penerapan *smart governance* dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan data dan teknologi digital. Dengan demikian, governansi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa governansi digital memiliki potensi besar sebagai strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana governansi digital dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat melalui pendekatan studi literatur. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis teknologi di era digital saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep governansi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif melalui analisis terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta kesenjangan penelitian yang berkaitan dengan topik governansi digital dan partisipasi publik, sehingga menghasilkan sintesis pengetahuan yang lebih terstruktur dan mendalam (Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional yang memiliki kredibilitas tinggi dan relevan dengan topik penelitian. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel yang membahas governansi digital, e-government, atau partisipasi masyarakat; (2) artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (2018-2025); (3) artikel yang terindeks dalam database bereputasi; serta (4) artikel yang memiliki akses penuh (full text) sehingga memungkinkan analisis secara menyeluruh. Penentuan kriteria ini penting untuk memastikan kualitas dan validitas data yang digunakan dalam penelitian (Xiao & Watson, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada berbagai database ilmiah seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, dan *Springer*. Proses pencarian

dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “digital governance”, “e-government”, “public participation”, “*digital public services*”, serta “citizen engagement”. Selain itu, digunakan pula teknik *boolean search* untuk meningkatkan efektivitas pencarian literatur sehingga diperoleh sumber yang relevan dan berkualitas. Metode pencarian sistematis ini merupakan langkah penting dalam studi literatur untuk menghindari bias dalam pemilihan sumber (Gusenbauer & Haddaway, 2020).

Setelah proses pengumpulan data, dilakukan tahap seleksi literatur menggunakan pendekatan screening yang meliputi identifikasi judul, abstrak, serta isi artikel secara keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi artikel yang paling relevan dengan fokus penelitian dan mengeliminasi duplikasi sumber. Proses seleksi ini mengacu pada prinsip *systematic review* yang menekankan transparansi dan replikasi dalam pemilihan literatur (Page et al., 2021). Hasil seleksi kemudian disusun dalam bentuk matriks literatur yang memuat informasi penting seperti nama penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta temuan utama dari masing-masing artikel. Penyusunan matriks ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis serta membantu dalam mengidentifikasi hubungan antar penelitian yang dikaji. Matriks literatur juga berfungsi sebagai alat sintesis untuk merangkum berbagai temuan secara sistematis (Snyder, 2019).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan komparatif. Tahap pertama dilakukan dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama, seperti konsep governansi digital, bentuk partisipasi masyarakat, serta implementasi e-government. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren penelitian yang berkembang dalam bidang tersebut. Analisis tematik ini merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam studi literatur untuk memahami fenomena secara mendalam (Braun & Clarke, 2021).

Tahap selanjutnya adalah melakukan perbandingan temuan antar penelitian (*comparative analysis*) dengan menganalisis persamaan dan perbedaan hasil penelitian terkait peran governansi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Analisis ini mencakup identifikasi faktor pendukung, hambatan, serta dampak implementasi teknologi digital dalam kebijakan publik. Pendekatan komparatif ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kritis dan komprehensif terhadap fenomena yang dikaji (Booth et al., 2021).

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (*drawing conclusion*) yang dilakukan dengan mensintesis seluruh temuan penelitian menjadi suatu pemahaman yang utuh. Kesimpulan difokuskan pada bagaimana governansi digital berperan sebagai strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi teoritis dan praktis yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik berbasis digital di masa mendatang. Sintesis hasil penelitian merupakan inti dari studi literatur yang bertujuan untuk menghasilkan kontribusi ilmiah yang relevan dan aplikatif (Xiao & Watson, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Governansi Digital dalam Kebijakan Publik

Governansi digital merupakan suatu pendekatan dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Konsep ini berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan administratif, governansi digital juga mencerminkan transformasi struktural dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat.

Menurut Mergel et al., (2019), transformasi digital di sektor publik mencakup perubahan budaya organisasi, model layanan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berbasis data.

Lebih lanjut, governansi digital juga berperan dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, teknologi digital menjadi alat untuk membuka akses informasi dan memperluas ruang keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan.

Criado et al., (2020) menyatakan bahwa digital governance memungkinkan terciptanya hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat melalui platform digital yang interaktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa governansi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

2. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Partisipasi

Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-government, media sosial, dan aplikasi pelayanan publik telah membuka peluang besar bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Teknologi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara real-time, memberikan masukan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan tanpa harus terhambat oleh batasan geografis. Linders (2019) menekankan bahwa platform digital dapat mendorong keterlibatan masyarakat melalui konsep co-production, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra dalam penyelenggaraan layanan publik.

Penggunaan media sosial oleh pemerintah juga menjadi sarana efektif dalam menjangkau aspirasi masyarakat. Interaksi dua arah yang terjadi melalui platform digital memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan responsif.

Criado et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, terutama dalam proses konsultasi publik dan penyampaian aspirasi. Berikut tabel ringkasan peran teknologi dalam partisipasi masyarakat:

Tabel 1. Ringkasan Peran Teknologi

Teknologi Digital	Bentuk Partisipasi	Dampak
E-Government	Akses layanan publik online	Meningkatkan efisiensi dan transparansi
Media Sosial	Penyampaian aspirasi & diskusi publik	Meningkatkan engagement masyarakat
Aplikasi Layanan Publik	Pengaduan & feedback	Mempercepat respon pemerintah
Platform Konsultasi	Partisipasi dalam perumusan	Meningkatkan inklusivitas

Online	kebijakan	kebijakan
--------	-----------	-----------

Sumber: diolah oleh peneliti

Tabel tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas, inklusif, dan adaptif bagi masyarakat. Melalui berbagai platform seperti e-government, media sosial, dan aplikasi layanan publik, masyarakat tidak lagi terbatas oleh hambatan geografis maupun birokrasi yang kaku dalam menyampaikan aspirasi. Teknologi memungkinkan terjadinya interaksi dua arah secara real-time antara pemerintah dan masyarakat, sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Keberadaan teknologi digital juga mendorong terjadinya transformasi pola partisipasi dari yang bersifat konvensional menjadi partisipasi digital yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang dapat memberikan masukan, kritik, bahkan turut serta dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya memperluas akses partisipasi, tetapi juga meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital secara optimal dapat menjadi katalisator dalam memperkuat demokrasi partisipatif. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, tingkat literasi digital masyarakat, serta komitmen pemerintah dalam menyediakan sistem yang transparan, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Tantangan Implementasi Governansi Digital

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi governansi digital masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks dan multidimensional. Transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga perubahan sistem, budaya organisasi, serta kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan digital (digital divide) yang menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi.

Meijer & Bolívar (2018) menyatakan bahwa keterbatasan infrastruktur dan akses internet menjadi hambatan signifikan dalam penerapan governansi digital, terutama di wilayah pedesaan atau daerah tertinggal. Kondisi ini mengakibatkan ketimpangan dalam partisipasi masyarakat, di mana hanya kelompok tertentu yang dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal.

Keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan serius dalam implementasi governansi digital. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan dalam memahami informasi, berpikir kritis, serta berpartisipasi secara aktif dalam ruang digital.

OECD (2020) menegaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital dapat menghambat pemanfaatan platform digital yang telah disediakan oleh pemerintah. Akibatnya, meskipun berbagai aplikasi dan layanan digital telah dikembangkan, tingkat partisipasi masyarakat tetap rendah karena keterbatasan

kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek kelembagaan dan budaya birokrasi dalam pemerintahan. Transformasi menuju governansi digital seringkali menghadapi resistensi internal dari aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya siap beradaptasi dengan perubahan teknologi. Pola kerja yang masih konvensional, kurangnya kompetensi digital di kalangan aparatur, serta minimnya integrasi antar lembaga menjadi hambatan dalam implementasi sistem digital yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan governansi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi yang mendukung digitalisasi pemerintahan secara menyeluruh.

Tantangan yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan data dan privasi yang semakin krusial di era digital. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan melibatkan pengelolaan data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi masyarakat yang bersifat sensitif. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu menjamin keamanan data pengguna. Tanpa adanya sistem keamanan yang kuat dan regulasi yang jelas, implementasi governansi digital berpotensi menimbulkan risiko seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serta serangan siber. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi keterbatasan dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi dinamika transformasi digital secara cepat. Kurangnya sinkronisasi antar regulasi, lambatnya proses pengambilan keputusan, serta belum optimalnya implementasi kebijakan berbasis digital menjadi hambatan dalam pengembangan governansi digital yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah dalam memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara inklusif, aman, dan berkelanjutan.

4. Strategi Optimalisasi Governansi Digital

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi governansi digital, diperlukan strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Transformasi digital dalam pemerintahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai aspek mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga regulasi yang mendukung. Salah satu strategi utama yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan merata, merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan digitalisasi pemerintahan. Tanpa infrastruktur yang kuat, berbagai inovasi digital yang dikembangkan oleh pemerintah tidak akan dapat diakses secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sektor infrastruktur, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi strategi krusial dalam mendorong partisipasi publik. Literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup

kemampuan dalam memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis.

Menurut van Dijk (2020), literasi digital merupakan salah satu faktor kunci dalam menjembatani kesenjangan digital serta meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam ruang digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan program edukasi digital yang inklusif, seperti pelatihan masyarakat, integrasi literasi digital dalam pendidikan, serta kampanye kesadaran penggunaan teknologi secara bijak.

Strategi berikutnya adalah pengembangan platform digital yang *user-friendly* dan inklusif. Desain platform yang sederhana, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna akan meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam layanan digital pemerintah. Platform yang terlalu kompleks justru dapat menjadi hambatan baru bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pengguna (*user-centered design*) menjadi penting dalam pengembangan sistem digital pemerintahan agar layanan yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik. Ketersediaan data yang terbuka (*open data*) memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara luas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi juga mendorong akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik. Dengan adanya kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi bagian nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Optimalisasi governansi digital juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan sistem digital yang kompleks, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dalam hal pengembangan teknologi, pendanaan, serta penyediaan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan penerapan strategi yang terintegrasi tersebut, governansi digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta meningkatkan kualitas kebijakan publik secara keseluruhan.

SIMPULAN

Governansi digital merupakan strategi transformasional dalam tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Melalui integrasi teknologi digital, pemerintah tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kehadiran berbagai platform digital seperti *e-government*, media sosial, dan aplikasi layanan publik telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik.

Implementasi governansi digital masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kesenjangan digital (*digital divide*) menjadi hambatan utama yang

menyebabkan tidak meratanya akses terhadap teknologi, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat turut menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal dalam mendukung partisipasi publik. Tantangan lain seperti keamanan data, perlindungan privasi, serta kesiapan kelembagaan pemerintah dalam mengadopsi teknologi digital juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penerapan governansi digital secara menyeluruh.

Upaya strategis yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan penerapan governansi digital. Peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan literasi digital masyarakat, pengembangan platform yang mudah diakses dan digunakan, serta kebijakan yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi menjadi langkah yang harus diprioritaskan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, governansi digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat demokrasi partisipatif serta menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolívar, M. P. R. (2021). Smart governance: Opportunities and challenges in the digital era. *Technological Forecasting and Social Change*, 161, 120254. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120254>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). Sage Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in thematic analysis. *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2021.1906530>
- Criado, J. I., Guevara-Gómez, A., & Villodre, J. (2021). Digital governance and public participation: The role of technology in public sector transformation. *Sustainability*, 13(6), 3468. <https://doi.org/10.3390/su13063468>
- Gusenbauer, M., & Haddaway, N. R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews? *Scientific Data*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.1038/s41597-020-00638-4>
- Linders, D. (2019). Co-production in digital public services. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101387. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101387>
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2018). Governing the smart city: A review of the literature on smart governance. *Government Information Quarterly*, 35(1), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.001>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101385>
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). *Public participation for 21st century democracy*. Jossey-Bass.
- Nam, T. (2019). Citizen participation and smart city governance: The role of technology. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101421.

<https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.04.003>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Digital government review. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9a6c9e1e-en>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity Press. <https://doi.org/10.4135/9781529714449>

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Scientometrics*, 120(1), 93–114. <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03244-6>

TENTANG PENULIS

Penulis, adalah Mahasiswa dan Dosen dari Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo